

PENDAMPINGAN BERBASIS LOKAL UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GLAGAHARJO DAN ARGOMULYO CANGKRINGAN

Tri Siwi Nugrahani

Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu Yogyakarta

E-mail: tri_siwinugrahani@yahoo.com

Abstract

The aim of this research is to propose a local based assistancy model for empowering society's economics to reduce poverty problem in Cangkringan Sleman, especially in Glagaharjo and Argomulyo region. This research using 23 groups of farmer to be the subject of this research. For collecting data, this research using survey and an interview method. And for analyzing data, researcher using qualitative and quantitative descriptive method.

The data analysis show that almost farmer groups who work as a farmer having monthly revenue between Rp 300.000 - Rp 500.000. It means that the average revenue is still below the regional minimum wage (UMR) and almost of them still classified into beginner group. The economic's activity in Glagaharjo and Argomulyo have formed in an unique way. There are having a rice barn in Argomulyo and planting sengon tree in Glagaharjo. The leaf of the sengon tree has used to feeding the resident's cattle. Both the resident in Argomulyo and Glagaharjo feel that the assistancy program which is held by government, especially from department of agriculture has completely done. But it's not the same condition in the women empowerment sector. The women empowerment has no activity and there are no sustainability condition for their economic's activity. It means that for this sector, there are more things to do for intensively assisting them which can form in a various way, such as giving them planning, processing, and marketing. It is important too for giving them assistancy in motivating and maintaining their business activity.

The result show that the draft of local based assistancy model for empowering economic's society in Argomulyo and Glagaharjo can be sustainability continued and developed for reducing poverty problem.

Keywords: *Assistancy model, empowerment of economic's society.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengusulkan model pendampingan berbasis lokal dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai salah satu cara mengurangi kemiskinan di Kecamatan Cangkringan, khususnya di desa Glagaharjo dan Argomulyo. Subyek penelitian ini adalah kelompok petani sebanyak 23 orang. Penelitian ini menggunakan metode *survey* dan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Berdasar analisis data menunjukkan sebagian besar anggota kelompok tani bekerja sebagai petani dan jumlah pendapatan perbulan antara Rp. 300.000 hingga Rp. 600.000, hal ini berarti rata-rata pendapatan masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR) dan sebagian besar anggota kelompok belum termasuk dalam kelompok kelas usaha tani dalam kategori pemula atau lanjut. Selain itu untuk kelompok Argomulyo dan Glagaharjo juga memiliki kesadaran untuk memajukan ekonomi masyarakat dengan cara lumbung padi di desa Argomulyo dan menanam

pohon sengon di desa Glagaharjo, dan memanfaatkan daun sengon untuk pakan ternak. Baik di desa Argomulyo, maupun Glagaharjo merasa pendampingan yang dilakukan oleh dinas pertanian sudah mencukupi. namun tidak untuk kelompok wanita karena keberlangsungan usaha dan kegiatan berhenti. Hal ini menunjukkan diperlukan pendampingan yang intensif untuk kelompok wanita dimulai dari perencanaan, proses dan pemasaran, selain itu diperlukan pendampingan pemotivasi-an usaha dan pengelolaan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan draf model pendampingan berbasis lokal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di desa Argomulyo dan Glagaharjo Kecamatan Cangkringan dapat dilanjutkan dan dikembangkan dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Keywords: Model Pendampingan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensi. Secara umum masyarakat miskin berada dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasi-an, dan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya secara layak. Oleh karena itu perlu upaya penanggulangan kemiskinan yang seyogyanya diletakkan dan dipercayakan kepada masyarakat itu sendiri, tentunya dengan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah, maupun pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil lainnya, sehingga proses penanggulangan kemiskinan akan menjadi suatu gerakan masyarakat yang akan menjamin potensi kemandirian dan keberlanjutan guna meningkatkan kehidupannya yang lebih layak (Sukesi, K., 2009: 1).

Menurut Bappenas (2006), kemiskinan yaitu terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, akses layanan perumahan dan sanitasi, akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga. Kemiskinan dapat berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan dapat diukur dengan rendahnya perkapita. Garis kemiskinan di pedesaan Tahun 2011 sebesar

Rp. 226.770 perkapita perbulan (Republika, 2 Januari 2012). Kemiskinan dapat pula terjadi akibat bencana, sejumlah 13.568 penduduk Cangkringan yang termasuk miskin. Selisih jumlah penduduk antara Tahun 2010 (28.884 jiwa) dengan Tahun 2011 (27657 jiwa) sebesar 1227 jiwa atau 4,24% dari tahun 2010. Tabel kemiskinan masyarakat Cangkringan tahun 2011 sebagai berikut.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan di Glagaharjo Cangkringan.

Desa	Th.2011 (jiwa)	% Miskin
Glagaharjo	1565	11,53%
Argomulyo	3693	27,21%
Total	5258	

Sumber: Monografi Cangkringan 2010 dan Lampiran SK Bupati Sleman 2011.

Apabila mengamati Tabel 1 diatas yang menunjukkan banyaknya masyarakat miskin di Cangkringan tepatnya di daerah Glagaharjo sebesar 1565 jiwa, dan Argomulyo sebesar 4258 jiwa. Hal ini berarti kemiskinan di wilayah tersebut cukup besar. Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan pengurangan kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PNPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2005 hingga tahun 2012 sekarang, maupun program pengentasan kemiskinan yang lain, namun program tersebut

tetap kurang berhasil dalam mengurangi kemiskinan.

Berbagai penyebab ketidakberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut karena kurang sinerginya program-program pengentasan kemiskinan dari tiap lembaga atau instansi sehingga terjadi tumpang tindih, program bersifat jangka pendek dan kurang mendidik masyarakat karena hanya bersifat pasif (sehingga masyarakat mengharap menerima bantuan tanpa produksi, seperti BLT), program tidak dilakukan pengawasan, tidak dilakukan sistem pendampingan yang berbasis lokal, tidak berorientasi jangka panjang dan hanya bersifat perguliran dana. Karena program-program pengentasan kemiskinan tidak dievaluasi sehingga perkembangan usaha produksi juga kurang terdeteksi termasuk pada usaha rumah tangga dan petani di Kecamatan Cangkringan, khususnya Desa Glagaharjo dan Argomulyo.

Berdasar *survey* dan observasi dilapangan dan studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh tim peneliti menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan di wilayah Cangkringan sudah saatnya dilakukan dengan sistem pendampingan berbasis lokal dan berkelanjutan. Studi ini bertujuan mereferensikan pengajuan model pengurangan kemiskinan yang sudah dilakukan terdahulu pada program yang ada. Model pengurangan kemiskinan di Cangkringan menggunakan pemberdayaan ekonomi dengan sistem pendampingan yang berbasis lokal. Harapan diimplementasikannya model pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan Cangkringan ini, khususnya di desa Glagaharjo dan Argomulyo dengan sistem pendampingan yang disesuaikan dengan aspek lokal yaitu akan menghasilkan cara efektif dalam pengentasan kemiskinan yang akhirnya pendapatan perkapita meningkat.

Penelitian ini menggunakan sampel kelompok petani di desa Glagaharjo dan Argomulyo kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY. Alasan pengambilan sampel pada kelompok tersebut karena pada kelompok usaha di desa tersebut dahulu aktif berproduksi dan aktif dalam menjalankan pro-

gram pengentasan kemiskinan seperti program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin (UPPKS). Selain program tersebut, di wilayah tersebut juga banyak menjalankan program lain seperti Program Nasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PNPM), Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmaskin). Namun hasil program pengentasan kemiskinan tersebut kurang berhasil. Studi ini menggunakan pendekatan partisipasi aktif masyarakat setempat dan pendampingan. Selain itu untuk mereferensikan model pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat menggunakan pendekatan rantai nilai kluster (*value chain cluster*). Karena pendekatan ini untuk menjamin kelangsungan proses pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Rantai nilai yang dibentuk dan dikembangkan akan memberi kerjasama dan saling membutuhkan dalam rangkaian aktivitas usaha bagi kelompok usaha rumah tangga dan kelompok petani yang dibentuk. *Networking* yang telah dibentuk ini diharapkan dapat berjalan secara terus menerus dalam rangkaian usaha yang menjadikan antar kelompok satu dengan yang lain saling membutuhkan dan saling menguatkan bagi keberlangsungan unit usahanya (Sasono, 2010).

Rumusan Masalah

Berdasar keterangan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana model pendampingan berbasis lokal dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Glagaharjo dan Argomulyo kecamatan Cangkringan?”

Tinjauan Pustaka

Fenomena Kemiskinan

Menurut hasil penelitian LIPI (Kompas, 10 Maret 2011) kenaikan anggaran untuk kemiskinan sebesar 10-15 persen per tahun tidak diikuti dengan perbaikan dalam efektivitas penggunaannya. Pada periode 2000-

2004, setiap persen kenaikan anggaran mampu menurunkan 0,4 persen angka kemiskinan, sementara periode 2005-2009 hanya 0,06 persen. APBN Pusat Tahun 2010 menunjukkan untuk belanja pegawai dan membayar cicilan utang tahun lalu Rp.162,6 triliun dan 153,6 triliun. Sementara anggaran untuk pengurangan kemiskinan hanya 80 triliun. Anggaran untuk belanja kesehatan hanya sekitar 2,2 persen dari total APBN Pusat 2010 dan kurang dari 1 persen dari PDB.

Pemerintah juga telah berupaya keras melakukan koreksi terhadap penyebab kegagalan mengurangi kemiskinan dan mengadopsi semua mantra kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tahun lalu pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin langsung oleh wakil presiden, namun sampai sekarang kurang menunjukkan hasil. Seharusnya pemerintah Indonesia belajar dari negeri Cina. Tahun 2012, apabila kemiskinan diukur dari pendapatan 2 dollar AS per hari, angka kemiskinan Cina turun drastis dari 70 persen menjadi 21 persen, sementara Indonesia dari 71 persen turun menjadi 42 persen. Penurunan tingkat kemiskinan yang sangat tajam di Cina karena Cina mengutamakan pembangunan pedesaan selama 10 tahun pertama. Cina berpendapat apabila difokuskan pada pedesaan, nanti akan menciptakan kelas menengah baru di pedesaan, karena Cina memerangi kemiskinan di basis kemiskinan. Kunci keberhasilan Cina dalam mengurangi kemiskinan adalah pembangunan di Cina yang dimulai dari desa dan pertanian. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia belum menyentuh langsung akar persoalan kemiskinan dan hak-hak dasar kelompok miskin, tidak memiliki karakter penguatan lokal, dan tidak mengatasi masalah kemiskinan yang multi dimensi.

Program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah selama ini dinilai tidak bervisi jangka panjang. Program beras miskin, fasilitas pembiayaan di desa-desa atau Program Nasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PNPM), menurut Saparini dalam harian Kompas mengemukakan sistem

pengentasan kemiskinan rakyat hanya untuk keluar dari kubang kemiskinan. Jadi bersifat sementara dan tidak berkelanjutan (Saparini, Kompas, 10 Maret 2012). Bahkan menurut garis kemiskinan dipedesaan pada September 2011 diukur dengan tingkat pendapatan perkapita perbulan minimal sebesar Rp. 226.770 (Republika, 2 Januari 2012).

Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kemiskinan dapat terjadi karena rendahnya produktivitas, misalnya kurangnya keterampilan dalam memilih bibit dan pupuk, maka hasil dari pertanian jagung tidak terlalu tinggi. Belum lagi petani seringkali kesulitan dalam melakukan pemasarannya. Selain itu terdapat jarak antara kelompok yang kaya dan yang miskin. Kelompok yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Inilah yang menimbulkan ketegangan sosial. Potensi ketegangan ini semakin diperluas karena sebagian besar masyarakat Indonesia berasal dari budaya agraris yang tidak terampil berdagang dan berbisnis (Nasution, 2009).

Tuntutan keterlibatan Pemda dalam penanggulangan kemiskinan semakin jelas dengan diluncurkannya Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) oleh Pemerintah Pusat pada 2005 yang menyatakan perlunya kontribusi semua pemangku kepentingan, termasuk Pemda, dalam upaya bersama untuk mengurangi kemiskinan. Pada kenyataannya, masing-masing daerah mempunyai kapasitas kelembagaan yang berbeda dalam penanggulangan kemiskinan dikarenakan tingkat keterlibatan organisasi yang ada di daerah tersebut, kondisi kemiskinan, dan latar belakang geografis daerah.

Mengukur kemiskinan tidak mudah, karena sangat tergantung pada interpretasi miskin. Misalnya secara psikologis, seseorang merasa miskin karena muncul suatu perasaan dari individu-individu anggota masyarakat yang selalu membandingkan dirinya dengan individu lain dalam suatu masyarakat (*reference group*), dan mereka menjadi bagian dari miskin. Kemiskinan terjadi di

mana saja, termasuk di negara-negara maju yang secara absolut masyarakatnya telah jauh di atas garis kemiskinan. Jepang sebagai negara *post industry*, rata-rata pendapatannya telah jauh melampaui garis kemiskinan absolut, tetapi masih banyak pula orang Jepang yang merasa dirinya miskin. Ini terjadi karena perasaan relatif (Winami, 1994).

Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan bersifat masal dan parah pada umumnya terdapat di negara berkembang. Namun, terdapat bukti bahwa kemiskinan juga ada di negara maju. Di negara berkembang, kemiskinan sangat terkait dengan aspek struktural. Misalnya sistem ekonomi yang tidak adil, merajalela KKN, ada diskriminasi sosial, atau tidak ada jaminan sosial. Sedangkan kemiskinan di negara maju lebih bersifat individual. Misalnya mengalami kecacatan (fisik atau mental), ketuaan, sakit yang parah dan berkepanjangan, atau kecanduan alkohol. Kondisi ini biasanya melahirkan tuna wisma yang berkelana kesana kemari atau keluarga tunggal, yang secara umum dialami ibu-ibu yang hidupnya tergantung pada bantuan sosial dari pemerintah, seperti kupon makanan atau tunjangan keluarga (Suharto, 2009). Oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang alasan kemiskinan dan cara memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep yang memberi kerangka acuan mengenai mantra kekuasaan (*power*) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Konsep pemberdayaan akan diawali dari munculnya konsep paradigma pembangunan mandiri dan sejahtera yang berpusat pada empat sumber (modal utama) yakni; modal fisik, modal manusia, modal sosial dan modal budaya. Dengan demikian, model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan yang lebih besar kepada individu atau masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan tersebut dan bukan sebagai obyek. Tujuannya adalah untuk menggali segala potensi dasar yang dimiliki oleh warga

masyarakat tersebut untuk dapat didorong agar mereka lebih mampu berdaya guna serta berdaya saing tinggi secara mandiri dan berkelanjutan. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred participatory, empowering and sustainable*" (Chambers, 1995).

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat disebabkan beberapa faktor, seperti yang dikemukakan oleh Sharp dkk, (1976) dalam Wuri (2009) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dapat dipandang dari sisi ekonomi, yaitu: ada ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, ada perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan produktivitas rendah sehingga upah yang diterima juga rendah. Selain itu kemiskinan disebabkan ada perbedaan akses dalam modal.

Sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku tidak adil termasuk krisis ekonomi global yang melanda hampir seluruh negara di dunia mulai kuartal III tahun 2008 juga merupakan penyebab kemiskinan. Krisis tersebut ikut mengombang-ambingkan harga saham dan tingkat kurs yang mengakibatkan semakin tingginya biaya produksi dan memperbesar angka pengangguran. Hal ini mengakibatkan angka kemiskinan semakin besar jika pemerintah tidak segera turun tangan dan dapat mengakibatkan tingkat kriminalitas yang tinggi serta kerusakan seperti yang terjadi di Negara-negara tetangga seperti Thailand dan India. Berkaitan dengan krisis ekonomi global yang terjadi, pemerintah merencanakan tidak meminta bantuan keuangan dari IMF (Marwaan, 2008).

Kenaikan BBM telah menghantarkan rakyat Indonesia jatuh kedalam jurang kemiskinan dan ini menunjukkan kondisi perekonomian yang buruk. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM pada tanggal 1 April 2012 dari Rp. 4.500 menjadi Rp. 6.000 per liter berpengaruh pada seluruh

sektor yang berakibat pada semakin melemahnya daya beli masyarakat. Banyaknya pengangguran juga menambah jumlah kemiskinan. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Republika, 23 Nopember, 2010) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Propinsi DIY pada Agustus 2009 sebesar 6,00 persen mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2008 (5,38%), atau tetap bila dibandingkan keadaan Februari 2009 (6,00%). Jumlah penganggur terbuka di DIY pada Agustus 2009 sebesar 121 ribu orang. Bertambah sekitar 13,5 ribu orang bila dibandingkan keadaan Agustus 2008 sebesar 107,5 ribu orang, tetapi berkurang sekitar 2 ribu orang bila dibandingkan keadaan Februari 2009. Kemiskinan memang tidak dapat dihilangkan, namun perlu dilakukan upaya pengurangan jumlah kemiskinan. Hal ini yang terus diupayakan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, salah satu cara mengentaskan kemiskinan yaitu dengan memberdayakan masyarakat.

Konsep Pengurangan Kemiskinan Dengan Model Pendampingan

Kebijakan PNPM sebagai salah satu program pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tujuan pembangunan daerah yang merujuk pada pembangunan nasional yakni pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Program pemerintah yang terpilih baik antar aspek maupun sub aspek dalam mengentaskan kemiskinan perlu dipadukan menjadi beberapa program yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan rumah tangga miskin di semua aspek. Dari program-program yang telah dipilih diharapkan program-program tersebut dapat bersinergi dan berkesinambungan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat rumah tangga miskin, meningkatkan peluang kerja dan memberantas kemiskinan (Papanek, G. 2007; Tri Sunarno, dkk., 2010).

Kenyataannya, program PNPM tidak berjalan efektif dan efisien. Hal ini terjadi karena program PNPM kurang ada evaluasi

dan pengawasan. Program hanya memfokuskan pada perguliran dana, dan tidak ada pendampingan. Selain itu program pengentasan kemiskinan yang lain seperti BLT, raskin dan kebijakan pengentasan kemiskinan lain kurang berhasil. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya dalam mengurangi kemiskinan yaitu dengan menggunakan pendekatan yang tepat diantaranya pendampingan yang berbasis lokal. Hal ini sesuai dilakukan pada masyarakat di Cangkringan khususnya masyarakat desa Glagahharjo dan Argomulyo.

Model Pendampingan merupakan aktivitas yang dapat dilakukan bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok usaha rumah tangga dan petani yang lebih bersifat menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Sistem pendampingan lebih berarti pada kebersamaan, kesejajaran, samping-menysamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan (BPKB Jawa Timur, 2001:5). Peran Pendamping sebatas memberi masukan pada kelompok usaha rumah tangga dan petani dengan menjelaskan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut bersifat positif terhadap kelompoknya. Dalam rangka pendampingan ini, hubungan yang dibangun oleh pendamping adalah hubungan konsultatif dan partisipatif.

Penelitian Sebelumnya Berkaitan Pengurangan Kemiskinan

Indriyati dan Nugrahani (2013) telah melakukan penelitian di Kecamatan Cangkringan berkaitan strategi pengentasan kemiskinan dengan merekomendasikan sebaiknya pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dilakukan secara pendampingan baik program dari pemerintah maupun

swasta, dan perlu dilakukan sinergi antar program agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaannya. Selain itu sedangkan studi Sasono (2010) menunjukkan bahwa faktor penentu kegagalan dan keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan kerjasama sinergis antar lembaga dan dilakukan pendampingan pada pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, Sedangkan studi Feresthi dkk (2008) merekomendasikan bahwa perlu menjaga manfaat lahan bahan input produksi agar tidak termarginalisasi oleh hal lain yang merugikan kepentingan peningkatan kesejahteraan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Glagaharjo dan Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Metode penelitian menggunakan pendekatan partisipasi aktif masyarakat dan pendampingan. Sampel penelitian adalah kelompok usaha rumah tangga dan kelompok petani dengan teknik pengambilan sampel kluster stratifikasi, yaitu kluster usaha rumah tangga dan petani yang dikelompokkan berdasarkan usaha rumah tangga dan dibedakan lagi berdasar jenis usaha dan jenis penerimaan program pengentasan kemiskinan.

Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan dengan menggunakan model pendampingan yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Sasono, 2010). Penyusunan desain penelitian terapan ini didasar-

kan pada pemikiran tim peneliti dan modifikasi dari model penelitian sebelumnya (Sasono, 2010) dengan berdasarkan studi empiris di wilayah penelitian yang menunjukkan masih belum berhasil program-program pengentasan kemiskinan baik yang dijalankan pemerintah maupun swasta selama ini yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin dan telah mengakibatkan perkapita dan hasil usaha kelompok usaha rumah tangga dan kelompok petani berkurang.

Selain itu dengan melihat aspek lokal di wilayah penelitian, berdasarkan hasil *survey* dan observasi tim peneliti, ternyata sebagian besar lahan pertanian di wilayah penelitian menjadi rusak akibat bencana merapi, petani kesulitan dalam mengerjakan usaha taninya, sehingga kelompok petani dalam mengkonsumsi beras setiap hari tidak semudah dahulu, mereka harus membeli. Hal tersebut mengakibatkan setiap KK warga Cangkringan perlu mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan standar hidup dan daya beli mereka kurang. Berdasar hasil *survey* dan observasi serta studi pendahulu yang dilakukan oleh tim peneliti menimbulkan minat untuk dilakukan penelitian tentang Model Pendampingan Berbasis Lokal untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan.

Adapun desain penelitian dibuat berdasar studi pendahulu yang dilakukan Sasono (2010) dan menggunakan modifikasi dari tim yaitu menggunakan pendekatan pendampingan melalui 7 tahap pendampingan, yaitu:

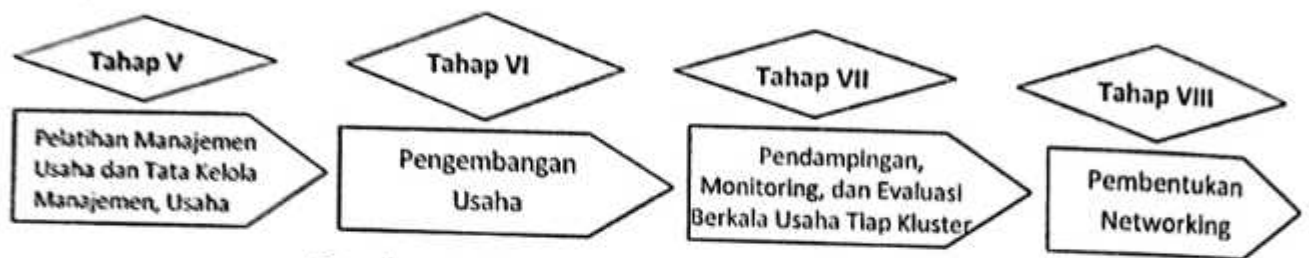


Gambar 1. Alur Pola Pendampingan Tahun I.

Berdasar gambar 1 menunjukkan bahwa alur pola pendampingan tahun pertama menggunakan pendekatan partisipasi aktif dan pendekatan pembentukan kluster. Tahap 1 melakukan pengidentifikasian hasil usaha yang sudah dilakukan dan kemungkinan peluang usaha yang akan dijalankan pada wilayah penelitian, tahap 2 melakukan Laporan Hasil Usaha yang sudah berjalan dan Daftar Rencana Program atau Usaha yang akan dilaksanakan dengan melihat aspek lokal, tahap 3 dari melakukan pembentukan karakter mandiri, tahap 4 melakukan pembentukan kluster atau kelompok berdasar sumber daya yang ada.

Indikator tahap 1 dan 2 dengan mengukur tingkat persentase keberhasilan usaha yang sudah ada dan mengukur realitas atau tidak peluang usaha yang direncanakan disesuaikan dengan aspek lokal dan sumber daya yang ada, tahap 3 diukur dengan tingkat kemandirian dan keberanian dalam berwira-usaha termasuk berani menanggung resiko, tahap 4 diukur dengan berapa banyak kluster yang terbentuk dengan disesuaikan dengan jenis usaha, sumber daya, dan aspek lokal setempat.

Sedangkan alur pola pendampingan penelitian yang dilakukan pada Tahun II sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Pola Pendampingan Tahun II.

Gambar 2 menunjukkan alur pola pendampingan tahun kedua dengan menggunakan pendekatan partisipasi aktif, pembentukan kluster, dan pendekatan rantai nilai kluster. Tahap 5 melakukan pendampingan dengan Pelatihan Manajemen Usaha dan Tata Kelola, Pelatihan Administrasi, Manajemen Usaha, Keuangan, Produksi, Pemasaran, dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Tahap 6 melakukan pendampingan tentang usaha, tahap 7 melakukan pendampingan kegiatan berproduksi/usaha dan mengawasi usaha yang dilakukan dari tiap kluster yang dilakukan secara kontinu, dan tahap 8 yaitu

pendampingan tentang pembuatan jaringan mitra.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data

Berdasar hasil wawancara dan observasi pada subyek penelitian yaitu kelompok tani dan usaha baik usaha rumah tangga maupun usaha ternak di desa Argomulyo, dan Glagaharjo Kecamatan Cangkringan dapat ditunjukkan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Profil Kelompok Tani dan Usaha di Kecamatan Cangkringan

No	Keterangan	Argomulyo			Glagaharjo		Total
		Petani	Usaha	Jumlah	Ternak	Usaha	
I.	Umur						
a.	30-40 tahun	1	3	4	6	2	8
b.	41-50 tahun	4	1	5	2	0	2
c.	51-60 tahun	1	0	1	0	1	1
d.	> 60 tahun	1	0	1	1	0	1
	jumlah	7	4	11	9	3	12

2.	Pendidikan terakhir							
a.	Tamat SD	1	4	5	3	1	4	14
b.	Tamat SMP	1	0	1	2	2	4	8
c.	Tamat SMA	2	0	2	4		4	16
d.	Tamat PT	3	0	3	0		0	3
	jumlah	7	4	11	9	3	12	23
3.	Jenis Pekerjaan							
a.	Petani	2	2	4	9	2	11	29
b.	Buruh	3		3			0	3
c.	Pedagang	2	1	3			0	6
d.	IRT, dll		1	1		1	1	3
	Jumlah	7	4	11			12	23

Dari tabel 2 di atas dapat dikatakan ada 23 orang sebagai pengamatan penelitian. Kelompok usaha di desa Argomulyo yang menjadi pengamatan ada 11 orang terdiri 7 orang kelompok petani dan 4 orang kelompok usaha perempuan yaitu jamur. Tingkat pendidikan penduduk di Argomulyo ada 3 orang yang tamat Perguruan Tinggi. Sedangkan di desa Glagaharjo ada 12 orang yang menjadi subyek penelitian terdiri 9 orang usaha ternak dan 3 orang usaha jamur.

Tingkat pendidikan paling rendah penduduk Glagaharjo yaitu tamat SD.

Berdasar data pemanfaatan dana PNPM untuk usaha perempuan di Kecamatan Cangkringan menunjukkan ada 12 kelompok yang memanfaatkan dana PNPM terdiri dari 9 kelompok dari Argomulyo, sedangkan di Glagaharjo ada 3 kelompok usaha perempuan. Rata-rata kondisi kelompok yaitu cukup dan baik. Dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Data Pemanfaatan dana PNPM di Kec. Cangkringan

No	Nama Kelompok	Desa	Jmlh Pinjaman	Pemanfaatan	Kondisi Kelompok
1	PKK Bakalan	Argomulyo	12,50 Juta	20	Baik
2	Aster Sewon		10 Juta	17	Cukup
3	Wijaya Kusuma Gayam		11 Juta	11	Cukup
4	Sakura Randusari		10	5	Cukup
5	Kenanga Kliwang		11	6	Cukup
6	Anggrek Gadingan		25 Juta	10	Baik
7	Alamanda Jiwan		10 Juta	10	Baik
8	PKK Mudal		16 Juta	6	Baik
9	Cempaka Kebur Lor		5 Juta	5	Baik
10	Dahlia Kebur Kidul		5 Juta	5	Baik
11	Ceplok Piring Teplok		10 Juta	8	Baik
12	Sumber Rejeki Banjarsari	Glagaharjo	25 Juta	10	Cukup
13	Karya Rejeki 1 Ngancar		15 Juta	15	Baik
14	Karya Rejeki 2 Ngancar		15 Juta	13	Baik

Data persepsi kemiskinan dari masing-masing anggota kelompok yang digunakan

untuk sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Persepsi Kemiskinan Tiap Kelompok

No	Keterangan	Frek	%	Argomulyo			Glagaharjo		
				Tani	Usaha	Jumlah	Usaha	Ternak	Jumlah
1	Luas lantai rumah < 8 m ²	22	53.69	3	1	4	1	3	4
2	Lantai rumah dari Tanah	24	58.54	4	2	6	1	4	5
3	Jenis dinding dari bamboo	8	3.28	1	1	2	2	3	5
4	WC dengan tetangga	3	7.32	0	1	1	0	0	0
5	Bahan bakar RT dari kayu	12	29.28	1	2	3	2	1	3
6	Konsumsi daging 1 x seminggu	16	39.02	2	1	3	3	4	7
7	Beli baju 1 stel 1 tahun	15	36.59	4	2	6	1	3	4
8	Apabila sakit ke puskesmas	33	80.49	7	3	10	2	6	8
9	Pemilikan lahan < 0,5 ha ²	30	73,17	5	3	8	2	6	8
10	Pendapatan ≤ Rp.300.000/bl	15	36,59	1	1	2	1	2	3
9	Tidak memiliki tabungan > Rp. 500.000	16	39.03	1	1	2	0	3	3
10	Sumber modal usaha kelompok dari iuran	26	63.46	3	1	4	2	3	5
11	Perasaan miskin	22	53.66	2	3	5	0	3	6
12	Kesulitan memenuhi kebutuhan pokok	29	70.73	5	2	7	0	3	7
13	Kesulitan menyetolahkan anak	16	39.02	3	2	5	0	2	3

Berdasar Tabel 4 menunjukkan sebagian besar anggota kelompok memiliki lahan < 0,5 hektar yaitu 73%, dan yang memiliki lantai rumah masih beralas tanah sebesar 54%. Namun apabila dilihat dari pendapatan perkapita yang kurang dari Rp. 300.000 ada 15 orang atau 37%. Hal ini menunjukkan anggota 50% yang berada dalam garis kemiskinan. Subyek yang memiliki dinding rumah dari bambu ada 8 orang atau 3%. Hanya 3 orang atau 7% yang masih memiliki MCK dengan tetangga, dan berobat ke Puskesmas apabila ada anggota keluarga ada yang sakit ada 80%, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk memanfaatkan fasilitas negara. Sebesar 37% masyarakat yang tidak memiliki tabungan yang berarti sebagian besar masyarakat sadar tentang kebermanfaatan masa depan

dalam menyisakan uang untuk kebutuhan mendatang.

Pemerintah cukup memperhatikan kebutuhan masyarakat yang digunakan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Cangkringan, terutama di desa Argomulyo dan Glagaharjo sudah dilakukan pemberian bantuan modal petani seperti pinjaman modal untuk petani dalam wujud Program Nasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ataupun bimbingan dari Badan Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam wujud penyuluhan pengelolaan hasil pertanian. Masyarakat Cangkringan cukup tertarik dengan program yang ditawarkan dari pemerintah yang dibuktikan dengan hasil kuisioner penelitian menunjukkan masyarakat memanfaatkan dana dana dari PNPM. Pendampingan masyarakat tentang pemberdayaan ekonomi sudah cukup baik

dilakukan oleh BPP karena BPP bersifat responsif dan mendampingi secara intensif sehingga pengurangan kemiskinan pada masyarakat Cangkringan cukup berhasil khususnya pada kelompok tani tetapi untuk kelompok wanita perlu digiatkan lagi.

Berdasar analisis data potensi lokal menunjukkan sudah ada potensi Sumber Daya

Manusia warga khususnya di Glagaharjo ada kesadaran untuk menanam sengon karena selain sebagai hutan rakyat juga dapat dijadikan aset apabila akan membutuhkan dana keluarga. Berikut data potensi lokal dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 5. Data Potensi Lokal

No	Keterangan	Argomulyo	Glagaharjo
1.	Luas Kec. Cangkringan	47,99 km ² 5 desa, 73 dukuh	
2.	Jumlah penduduk kec. Cangkringan	Kecamatan Cangkringan dihuni oleh 7.992 KK. Jumlah keseluruhan penduduk 27.657 orang dengan jumlah laki-laki 13.361 orang dan penduduk perempuan 14.296 orang dengan kepadatan penduduk mencapai 524 jiwa/km ² .	
3.	Luas wilayah dan jumlah dusun	8,47 km ² 22 dusun	7,95 km ² 10 dusun
4.	Letak geografis	U: Selo, boyolali T: Kemalang dan Manisrenggo, Klaten S: Ngemplak B: Pakem	U: kehutanan T: kab. Klaten S: Argomulyo B: Sungai Gendol
5.	Potensi Desa	Pertanian: padi, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan. Perikanan: kolam Peternakan: ayam kampung/ras, itik puyuh, kambing, domba, sapi, kerbau.	Perkebunan: kelapa Kehutanan: cengkeh, Sengon Peternakan: kambing, domba sapi, kerbau. Pekarangan: 233, Tegalan=488 Tanah = 74
6.	Potensi Sumber Daya		
7.	Jumlah Penduduk Miskin	Miskin 3693 jiwa	Miskin 1565 jiwa
8.	Jenis bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan BPP Ngemplak • Bantuan Dinas Pertanian • Dnas perindagkop • PNPM • Dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan BPP Ngemplak • Bantuan Dinas Pertanian dan Kehutanan • Dnas perindagkop • PNPM • Dll
9.			
10.	Potensi SDM	Ada kesadaran masy utk memanfaatkan lumbung padi sebagai ketahanan pangan	Ada kesadaran masy utk tanam sengon. Dan beli bibit KK yang rumahnya hancur dapat ditanami sengon, rumah dibangun JRF.
11.	Kondisi Subyek	Kelompok Tani: <ul style="list-style-type: none"> • Taruno Mulyo • Anggota 117 orang • Ketua: Bp. Riyanto • Lokasi: Pangung 	Kelompok Ternak/usaha sapi perah: <ul style="list-style-type: none"> • Sedyo makmur 1 dan 2 • Ketua: Yadi mulyono dan Bp. Kuwat Prayogo • Lokasi: Singlar • Ada 36 anggota • Dengan data jumlah induk sapi ada 35 ekor dan produksi anak sapi jantan 14 dan betina 18 ekor Kelompok perhutanan:

Kelompok Usaha Jamur Kuning:

- Kel. Sri Rejeki
- Ketua: ib. Suhartinah
- Anggota dulu 25 orang dibagi menjadi 5 kelompok

- Kel. Nyariro Gotro
- Ketua: Bp. Yadi Mulyo
- Wakil.: Bp. Kuwat
- Anggt kel ±120 orang menyebar di tiap pedukuhan

Kelompok Usaha jamur:

- Mawar Putih
- Budidaya Jamur Tiram
- Ketua : ib. Sukinem

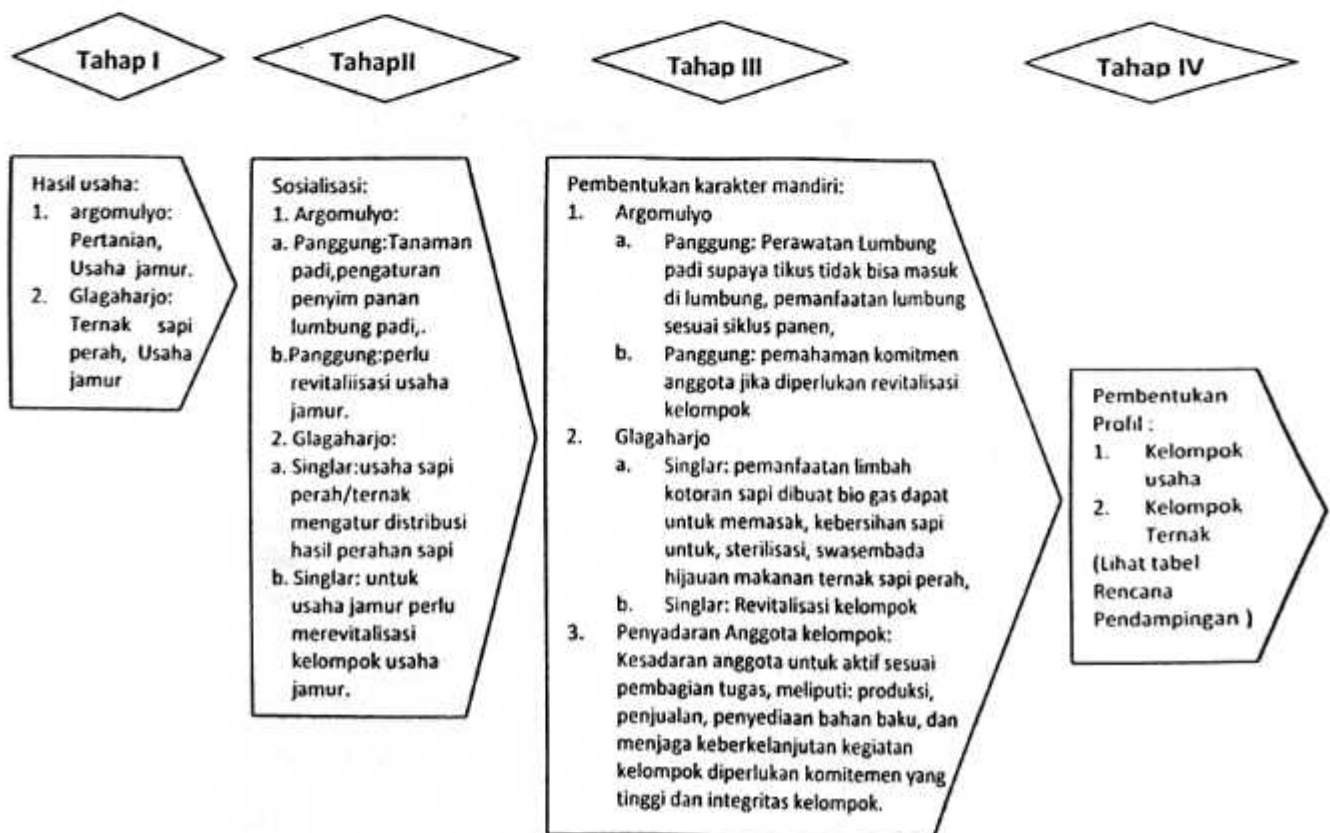
Sehingga apabila diimplikasikan dalam rancangan pendampingan dapat disusun draf alur model pendampingan pertama melalui empat tahap yaitu:

1. Tahap 1 sebagai penentuan hasil usaha yang sudah dilakukan.
2. Tahap 2 sebagai sosialisasi atas hasil usaha yang sudah dirancang dan disampaikan pada anggota kelompok.
3. Tahap 3 pembentukan karakter mandiri yaitu memotivasi kelompok dengan menumbuh kembangkan karakter yang mandiri.

4. Tahap 4 yaitu pembentukan profil baru setelah mengikuti tahap 1, 2, dan 3 sebagai dasar penentuan alur pendampingan yang akan diimplikasikan.

Berikut ini skema pendampingan yang dirancang oleh tim sebagai langkah awal dalam melaksanakan pendampingan, yang nantinya akan diuji cobakan pada penelitian tahap berikutnya. Untuk skema pendampingan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Model Pendampingan



Kesimpulan

Penelitian ini mereferensikan bahwa model pendampingan berbasis lokal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta mampu untuk diuji cobakan sebagai Model Pendampingan yang akan mampu meningkatkan penghasilan keluarga dan mengurangi kemiskinan khususnya pada kelompok petani di desa Argomulyo terdiri kelompok usaha perempuan, dan dari kelompok tani di Glagaharjo khususnya kelompok ternak sapi perah.

Berdasar hasil FGD antara tim peneliti dengan subyek dapat disepakati bahwa sistem pendampingan yang bersifat kontinu juga sudah dilakukan, meskipun relatif masih sedikit yaitu dilakukan pendampingan dari BPP Ngemplak, bari pertanian, maupun peternakan. Dari pendampingan yang bersifat *continue* (terus-menerus/intensif) mampu memajukan kelompok ternak dan kelompok tani. Namun untuk kelompok usaha perempuan pendampingan masih kurang terlebih di Argomulyo dan Glagaharjo pada kelompok usaha jamur.

Penyusunan draft model pendampingan berbasis lokal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Cangkringan ini layak untuk diimplikasikan sebagai wujud upaya keberlangsungan usaha sehingga peningkatan keluarga akan meningkat dan mampu mengurangi kemiskinan.

Saran

Penelitian ini masih memerlukan waktu yang panjang untuk mengimplikasikan model pendampingan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Cangkringan, karena keberhasilan implikasi model juga sangat ditentukan oleh motivasi dan minat serta semangat dari anggota kelompok. Oleh karena itu sistem pendampingan yang meliputi perencanaan, proses, pemasaran serta penguatan organisasi atau kelompok sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

- Chambers, Robert. 1995. "Pembangunan Desa Mulai dari Sekarang." Jakarta: LP 3 ES.
- Bappenas. 2005. "Hasil Kajian Pembelajaran dari Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan."
- BPKB. Pendampingan Masyarakat . 2001; 5. Jawa Timur.
- Feresthi, Saputro, dan Purnomo. 2008. "Penguatan Kapasitas Kluster Usaha Kecil dan Menengah : Kasus di Serenan, Klaten. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.9, No.1, Juni.
- Indriyati, dan Nugahani. 2013. "Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Perempuan" (Studi Empiris Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman DIY). Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna, Vol.1, No.15, Mei, No. ISSN: 1411-8114.
- Kompas. 10 Maret 2011. "Politik Anggaran yang Tak Memihak Orang Miskin."
- Marwaan. 2008. "Indonesia: Jakarta Says Thanks But Not Again, to IMF Loan." New York: Global Information Network. 26 Nopember.
- Nasution Pontas. 2009. "Perspektif Kemiskinan," Harian Kompas, 22 Februari.
- Papanek Gustav. 2007. "Dampak PNPM, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, pada Peluang Kerja dan Pemberantasan Kemiskinan," Jakarta: April.
- Republika. 2 Januari 2012. "Ini Dia Penyebabnya Orang Miskin di Bantul."
- Republika. 23 Nopember 2010. "Pengangguran di Yogyakarta terus Meningkat."

- Saparini. 2012. Sistem Pengentasan Kemiskinan Rakyat Hanya untuk. Kompas, 10 Maret 2012.
- Sasono. 2010. "Optimalisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin pada Sektor Mikro melalui Kerjasama Sinergis antara Bank Syariah dengan Lembaga Pemerintah dan Organisasi Sosial," Jurnal Syirkah, Vol. 5, No 1, Juni.
- Suharto, Edi. 2009. "Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia." Bandung: Alfabeta.
- Sukesi, Keppi. 2008. Perempuan dan Kemiskinan: Profil dan Upaya Pengentasan. Makalah Seminar, Workshop 27 Agustus 2008, Hotel Cakra Kusuma, Jakal KM 5,2 Km YK).
- Trisunarno Lantip, Eddy Setiadi Soedjono, Agnes Tuti Rumiati, dan Sutikno. 2010. "Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan" (Studi Kasus: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Metatu, Kab. Gresik dan Desa Sumberdodol, Kab. Magetan.
- Winarni F. 1994. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan. *Cakrawala Pendidikan*, No. 2, Th XIII, Juni.
- Wuri Josephine. 2009. Peran Program Nasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Menanggulangi Kemiskinan. Yogyakarta: Jurnal Bisnis dan Ekonomi-Antisipasi, Vol. 1, No. 1 Juni, Universitas Sanata Dharma.